

SKRIPSI

**NETRALITAS PRODUK JURNALISTIK PERUSAHAAN PERS
YANG DIMILIKI OLEH POLITISI DI INDONESIA**

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

HANI OLIVIA NISA

2110113149

Program Kekhususan Hukum Tata Negara (PK V)



Pembimbing:

Didi Nazmi, S.H., M.H.

Ilhamdi Putra, S.H., M.H.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2025

No Reg: 26/PK-V/IV/2025

NETRALITAS PRODUK JURNALISTIK PERUSAHAAN PERS YANG DIMILIKI OLEH POLITISI DI INDONESIA

(Hani Olivia Nisa, 2110113149, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 63

halaman, 2025)

ABSTRAK

Indonesia tidak membedakan kepemilikan perusahaan pers oleh politisi. Ketentuan kepemilikan perusahaan pers oleh politisi secara eksplisit belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah, yaitu: *pertama*, bagaimana fenomena dan pengaruh kepemilikan perusahaan pers oleh politisi terhadap netralitas produk jurnalistik; dan *kedua*, bagaimana desain ideal pengaturan kepemilikan perusahaan pers di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif dengan analisis deskriptif kualitatif yang bersumber dari data sekunder. Penelitian ini menyimpulkan; *pertama*, fenomena kepemilikan perusahaan pers oleh politisi di Indonesia berpotensi menyebabkan bias pemberitaan yang mengakibatkan adanya konflik kepentingan, keadaan ini secara simultan menghasilkan degradasi atas independensi karya jurnalistik yang berimplikasi pada terganggunya fungsi pengawasan oleh ekosistem pers di Indonesia. *Kedua*, desain kepemilikan perusahaan pers oleh politisi dapat diatur dengan pembatasan hingga derajat ketiga. Kepemilikan perusahaan pers oleh politisi dapat dibatasi hak asasinya melalui penerapan konsep *derogable rights*. Berdasarkan hasil pembahasan, penulis menyarankan organisasi pers mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi agar menafsirkan kembali melalui cara *judicial review* mengenai kepemilikan perusahaan pers dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Kata Kunci: Netralitas Jurnalistik, Kepemilikan Media, Politisi, Perusahaan Pers

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

NEUTRALITY OF JOURNALISTIC PRODUCTS OF PRESS COMPANIES OWNED BY POLITICIANS IN INDONESIA

(Hani Olivia Nisa, 2110113149, Faculty Of Law, Andalas University, 63 pages, 2025)

ABSTRACT

Indonesia does not differentiate between press company ownership by politicians. Provisions regarding press company ownership by politicians are not explicitly regulated in Law Number 40 of 1999 concerning the Press. This study aims to answer two research questions: first, how does the phenomenon of press company ownership by politicians affect the neutrality of journalistic products? And second, what is the ideal design for regulating press company ownership in Indonesia? This study employs a descriptive and normative juridical method, utilizing qualitative descriptive analysis based on secondary data. This study concludes: first, the phenomenon of press company ownership by politicians in Indonesia has the potential to cause bias in reporting that results in conflicts of interest. This situation simultaneously results in a degradation of the independence of journalistic work, which has implications for the disruption of the oversight function of the press ecosystem in Indonesia. Second, the design of press company ownership by politicians can be regulated with restrictions up to the third degree. Ownership of press companies by politicians can be limited in terms of their basic rights through the application of the concept of derogable rights. Based on the discussion, the author recommends that press organizations file a petition with the Constitutional Court to reinterpret, through judicial review, the ownership of press companies in Law Number 40 of 1999 concerning the Press.

Keywords: *Journalistic Neutrality, Media Ownership, Politicians, Press Companies*